

**MATRIKS TARGET CAPAIAN
USULAN RENCANA AKSI NASIONAL
OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2023-2024**

Komitmen	: Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
Kementerian/Lembaga Terkait	:
Bappenas	: Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika
CSO Mitra	: Yayasan Tifa
Point of Contact Kementerian/Lembaga	: Bapak Hendri Sasmita Yuda, Koordinator Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi, Kominfo

Sasaran Keberhasilan <i>(Dapat diisi sesuai dengan "Output yang diharapkan" yang terdapat dalam Milestone OGP)</i>	Penanggung Jawab <i>(Diisi dengan K/L atau OMS terkait)</i>	Ukuran Keberhasilan <i>(Merupakan tujuan akhir yang perlu dilakukan dalam mencapai output/Sasaran Keberhasilan)</i>	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
Tersedianya peraturan teknis mengenai mekanisme koordinasi antara lembaga PDP dengan K/L yang tepat guna	Ditjen Aptika Kominfo	Tersusunnya rekomendasi untuk penyusunan peraturan teknis mengenai mekanisme koordinasi antara lembaga PDP dengan K/L yang disusun berdasarkan penelitian partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi publik untuk menjangkau masukan publik terhadap konsepsi peraturan teknis mengenai mekanisme koordinasi antara lembaga PDP dengan K/L terlaksana • Tersedianya masukan atas rencana kajian yang akan dilakukan 	Tersedianya informasi mengenai rekomendasi yang diakomodasi atau yang tidak dapat diakomodasi, disertai dengan alasan	Tersusunnya rancangan peraturan teknis mengenai mekanisme koordinasi antara lembaga PDP dengan K/L	Tersedianya peraturan teknis mengenai mekanisme koordinasi antara lembaga PDP dengan K/L	<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi kajian dan rekomendasi • Risalah rapat
	Yayasan Tifa		Keterlibatan dalam konsultasi publik untuk memberikan masukan terhadap konsepsi peraturan teknis mengenai mekanisme koordinasi antara lembaga PDP dengan K/L	Tersedianya rekomendasi pengaturan mekanisme koordinasi antara lembaga PDP dengan K/L	Terlibat dalam uji publik rancangan peraturan teknis mengenai mekanisme koordinasi antara lembaga PDP dengan K/L	Tersedianya tanggapan/masukan atas peraturan teknis yang tersusun	

Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai pengendali data gabungan yang tepat guna dan proporsional	Ditjen Aptika Kominfo	Tersusunnya rekomendasi untuk penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai pengendali data gabungan yang disusun berdasarkan penelitian partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi publik untuk menjangkau masukan publik terhadap konsepsi PP mengenai pengendali data gabungan terlaksana • Tersedianya masukan atas rencana kajian yang akan dilakukan 	Tersedianya informasi mengenai rekomendasi yang diakomodasi atau yang tidak dapat diakomodasi, disertai dengan alasan	Tersusunnya rancangan PP mengenai pengendali data gabungan	Tersedianya PP mengenai pengendali data gabungan	<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi kajian dan rekomendasi • Risalah rapat
	Yayasan Tifa		Keterlibatan dalam konsultasi publik untuk memberikan masukan terhadap konsepsi PP mengenai pengendali data gabungan	Tersedianya rekomendasi untuk penyusunan PP mengenai pengendali data gabungan	Terlibat dalam uji publik rancangan PP mengenai pengendali data gabungan	Tersedianya tanggapan/masukan atas PP mengenai pengendali data gabungan	
Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai penilaian dampak PDP yang menjamin hak-hak subjek data	Ditjen Aptika Kominfo	Tersusunnya rekomendasi untuk pengaturan mengenai penilaian dampak PDP yang disusun berdasarkan penelitian partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi publik untuk menjangkau masukan publik terhadap konsepsi PP mengenai penilaian dampak PDP terlaksana • Tersedianya masukan atas rencana kajian yang akan dilakukan 	Tersedianya informasi mengenai rekomendasi yang diakomodasi atau yang tidak dapat diakomodasi, disertai dengan alasan	Tersusunnya rancangan PP mengenai penilaian dampak PDP	Tersedianya PP mengenai penilaian dampak PDP	<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi kajian dan rekomendasi • Risalah rapat

	Yayasan Tifa		Keterlibatan dalam konsultasi publik untuk memberikan masukan terhadap konsepsi PP mengenai penilaian dampak PDP	Tersedianya rekomendasi untuk penyusunan PP mengenai penilaian dampak PDP	Terlibat dalam uji publik rancangan PP mengenai penilaian dampak PDP	Tersedianya tanggapan/masukan atas PP mengenai penilaian dampak PDP	
Terlaksananya koordinasi berkala antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan PDP dalam penyusunan peraturan pelaksanaan UU PDP	Ditjen Aptika Kominfo	Terlaksananya setidaknya 3 forum diskusi multipihak antara perwakilan dari pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil yang bertujuan membahas perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksanaan UU PDP		Tersedianya paparan mengenai perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksanaan UU PDP	Tersedianya paparan mengenai perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksanaan UU PDP	Tersedianya paparan mengenai perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksanaan UU PDP	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar hadir • Paparan diskusi • Risalah diskusi
	Yayasan Tifa		Terlaksananya upaya penjangkaran masukan dari kelompok masyarakat sipil dan sektor privat mengenai proses dan substansi peraturan pelaksanaan UU PDP	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya forum diskusi pertama • Terlibatnya perwakilan dari pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil dalam forum diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya forum diskusi kedua • Terlibatnya perwakilan dari pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil dalam forum diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya forum diskusi ketiga • Terlibatnya perwakilan dari pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil dalam forum diskusi 	